

## Peran *Stakeholders* dalam Pemberdayaan Perempuan pada Program Bini Daya di Desa Tulungrejo Kota Batu

Annisa<sup>1</sup>, Putri Oki Nadila<sup>2</sup>, Najwa Safina Nurhaliza<sup>3</sup>, Kezia Y. Stephani Napitupulu<sup>4</sup>, Prisca Kiki Wulandari<sup>5</sup>

<sup>12345</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received Juni, 2025

Revised Juni, 2025

Accepted Juni, 2025

Available online Juni, 2025

annisaaa@student.ub.ac.id,  
putriokinadila@student.ub.ac.id,  
najwasafina714@student.ub.ac.id,  
keziaysn15@student.ub.ac.id,  
[prisca.kiki@ub.ac.id](mailto:prisca.kiki@ub.ac.id)

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.  
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

### ABSTRAK

Pemberdayaan perempuan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang berkelanjutan. Pemberdayaan perempuan dilakukan di setiap tingkatan pemerintah termasuk desa. Desa Tulungrejo menerapkan program pemberdayaan perempuan bernama Bini Daya yang berhasil mendapatkan prestasi dalam ajang Lomba Desa Tingkat Provinsi se-Jawa Timur. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui analisis *stakeholders* dan perannya dalam program Bini Daya sehingga program tersebut mendapatkan prestasi pada tingkat provinsi. Adapun metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif dipilih karena dalam penelitian ini dibutuhkan memahami fenomena secara mendalam melalui perspektif partisipan yang mengetahui secara langsung program Bini Daya. Selanjutnya penelitian deskriptif digunakan karena memberikan gambaran secara faktual sistematis dan akurat mengenai peran para *stakeholders* dalam pemberdayaan perempuan melalui program Bini Daya di Desa Tulungrejo, Kota Batu khususnya dalam mengeksplorasi kerjasama *stakeholders*

dalam pemberdayaan perempuan. Adapun hasil temuan peneliti menunjukkan bahwa keberhasilan program Bini Daya berkaitan dengan sinergi *stakeholders*, mulai dari Pemerintah Desa Tulungrejo, sebagai pembuat kebijakan hingga kelompok PKK dan KWT sebagai pelaksana kegiatan. Adapun peran stakeholdes diklasifikasikan berdasarkan teori Bryson yakni, *Subjects, Key Players, Context Setter dan Crowd*. Kemudian konsep peran Nugroho yang mencakup *policy creator*, koordinator, fasilitator, implementor, dan akselerator. Temuan menunjukkan bahwa kolaborasi *stakeholder* yang harmonis dalam program Bini Daya menciptakan pemberdayaan perempuan yang memberikan dampak nyata dan berkelanjutan bagi perempuan-perempuan di Desa Tulungrejo.

**Kata Kunci:** Pemberdayaan Perempuan; Peran *Stakeholders*; Bini Daya; Tulungrejo

### ABSTRACT

*Women empowerment is one of the important aspects in sustainable community life. Women empowerment is carried out at every level of government including villages. Tulungrejo Village implemented a women empowerment program called Bini Daya which successfully won an award in the East Java Provincial Village Competition. The purpose of this study was to determine the analysis of stakeholders and their roles in the Bini Daya program so that the program won an award at the provincial level. The research method used was descriptive qualitative. Qualitative research was chosen because this study required an in-depth understanding of the phenomenon through the perspective of participants who knew the Bini Daya program directly. Furthermore, descriptive research was used because it provided a factual, systematic and accurate picture of the role of stakeholders in women empowerment through the Bini Daya program in Tulungrejo*

\*Corresponding author

E-mail addresses: annisaaa@student.ub.ac.id

*Village, Batu City, especially in exploring stakeholder cooperation in women empowerment. The researcher's findings showed that the success of the Bini Daya program was related to stakeholder synergy, starting from the Tulungrejo Village Government, as a policy maker to the PKK and KWT groups as activity implementers. The role of stakeholders is classified based on Bryson's theory, namely Subjects, Key Players, Context Setters and Crowd. Then Nugroho's role concept includes policy creator, coordinator, facilitator, implementor, and accelerator. The findings show that harmonious stakeholder collaboration in the Bini Daya program creates women's empowerment that has a real and sustainable impact on women in Tulungrejo Village.*

**Keywords:** Women Empowerment; Stakeholders Role; Bini Daya; Tulungrejo

## 1. PENDAHULUAN

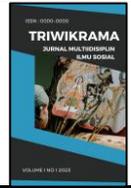
Pemberdayaan perempuan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang berkelanjutan. Pemberdayaan perempuan sering dimaknai sebagai pembagian kekuasaan yang adil sehingga mendorong peningkatan partisipasi perempuan untuk semua aspek kehidupan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan power kepada perempuan untuk mewujudkan diri dengan tujuan mempertinggi eksistensi perempuan pada masyarakat (Marmoah, 2019). Peran perempuan pada masyarakat memiliki potensi besar dalam mendorong kemajuan pembangunan di bidang ekonomi, sosial dan budaya. Namun, stereotip peran perempuan hanya mengerjakan tugas domestik (pekerjaan rumah). Sedangkan, laki-laki sebagai pencari nafkah dan pekerja publik seringkali menghambat ruang gerak perempuan terutama di wilayah pedesaan (Hubeis, 2018).

Data jumlah penduduk perempuan di Indonesia tercatat sebanyak 133,57 juta jiwa, yang mencakup sekitar 49,5% dari total populasi (Widiastuti et al., 2024). Namun, perempuan masih menghadapi tingkat pengangguran yang lebih tinggi walaupun jumlahnya hampir setara dengan laki-laki. Tingginya proporsi perempuan merupakan peluang yang harus dimanfaatkan karena perempuan yang berdaya memberikan kontribusi positif pada berbagai sektor. Oleh karena itu pemberdayaan perempuan sangat penting untuk dilakukan mengingat potensi besar yang dimilikinya. Program peningkatan pemberdayaan perempuan harus dengan kerjasama dengan berbagai *stakeholders* seperti, pemerintah, akademisi, swasta, organisasi masyarakat, media dan masyarakat.

Upaya peningkatan pemberdayaan perempuan akan meningkatkan status perempuan Indonesia dan kedudukan mereka dalam pemberdayaan perempuan terutama di pedesaan. Desa Tulungrejo merupakan salah satu wilayah yang telah menunjukkan komitmen kuat dalam memberdayakan perempuan. Dalam konteks ini Pemerintahan Desa Tulungrejo bersama dengan *stakeholders* bekerjasama dalam memberdayakan perempuan di Desa Tulungrejo. Pemberdayaan perempuan di desa ini terus dilakukan secara terarah dan berkelanjutan, melalui sinergi antara pemerintah Desa Tulungrejo dan komunitas perempuan seperti PKK (Pembinaan dan Kesejahteraan Keluarga). Salah satu program Bini Daya (Pembinaan Wanita Berdaya). Pada program ini merupakan program pemberdayaan wanita untuk meningkatkan peran wanita dalam pembangunan desa dengan bekerja sama dengan berbagai *stakeholder*.

Banyaknya *stakeholders* yang terlibat dalam pengerjaan program pemberdayaan perempuan Bini Daya di Desa Tulungrejo membuat program tersebut sukses dijalankan. Desa Tulungrejo berhasil mendapatkan prestasi dalam ajang Lomba Desa Tingkat Provinsi se-Jawa Timur tahun 2024. Prestasi ini tidak terlepas dari keberhasilan desa dalam menjalankan program inovatif bernama Bini Daya (Pembinaan Wanita Berdaya). Program ini merupakan bentuk nyata komitmen desa dalam mendorong pemberdayaan perempuan melalui pendekatan partisipatif dan berkelanjutan. Melalui pelatihan, pendampingan usaha, serta penciptaan ruang dialog antara perempuan dan pemerintah desa, program ini berhasil membuka akses dan peluang yang lebih luas bagi perempuan untuk berperan aktif dalam pembangunan desa. Bini Daya tidak hanya menyentuh aspek ekonomi, tetapi juga sosial dan budaya, dengan mengangkat semangat "wani berdaya" yang berarti perempuan berani untuk mandiri, berpendapat, dan berkarya. Inisiatif ini mendapat apresiasi tinggi karena mampu bersaing di tingkat provinsi dan mendapatkan prestasi.

Program pemberdayaan perempuan juga sejalan dengan Permendagri No. 144 Tahun 2014 Pasal 40 Ayat (3) yang menegaskan bahwa dalam setiap proses pembangunan desa, pemerintah



desa wajib melibatkan perwakilan perempuan (Tokan & Gai, 2020). Ketentuan ini menunjukkan adanya pengakuan negara terhadap pentingnya partisipasi perempuan dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan desa. Hal ini sejalan dengan langkah progresif yang dilakukan oleh Desa Tulungrejo, Kota Batu, melalui implementasi program Bini Daya (Pembinaan Wani Berdaya). Program ini secara aktif melibatkan perempuan dalam berbagai kegiatan pemberdayaan, baik di bidang sosial, ekonomi, maupun pengambilan keputusan di tingkat desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran *stakeholder* dalam pemberdayaan perempuan melalui implementasi program Bini Daya.

## TINJAUAN PUSTAKA

Mengkaji kajian sinergi perempuan dan peran pemerintah desa menjadi langkah awal yang dalam melakukan penelitian mengenai peranan *stakeholder* dalam pemberdayaan perempuan di desa. Pertama, penelitian dari (Bryan & Mekonnen, 2023) yang membahas mengenai program yang ditujukan untuk pemberdayaan perempuan dalam bentuk distribusi teknologi pertanian seperti pompa irigasi. Namun program ini justru memberikan efek yang negatif kepada perempuan, yang harus digaris bawahi bahwa dalam pelaksanaan program dalam konteks pemberdayaan perempuan seharusnya memperhatikan dinamika sosial dan juga keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan. Sehingga yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini adalah kurang adanya peran *stakeholders* yang kebersamaan dalam program yang bertujuan dalam pemberdayaan perempuan, terutama di desa. Akhirnya, dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk meneliti mengenai peran *stakeholders*.

Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Deininger et al., 2020) di desa India menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan dapat meningkatkan akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi serta partisipasi dalam program kerja pemerintah. Adanya pemimpin ataupun keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan dapat memperkuat suara perempuan dalam menuntut hak dan manfaat dari program kerja pemerintah. Tak hanya itu, keterlibatan perempuan juga dapat mengurangi praktik suap dan pelecehan yang sering kali terjadi saat proses administratif. Melalui keterlibatan perempuan ini, perempuan menjadi lebih aktif dalam pengawasan program. Kesuksesan program tentang keterlibatan perempuan untuk menjadi pemimpin ini tidak lepas dari adanya peran *stakeholders*. Namun dalam penelitian ini belum menjelaskan secara detail bagaimana peran *stakeholders* untuk menyukseskan program tersebut, sehingga diperlukan analisis dan penelitian lebih lanjut dalam membahas peran *stakeholders* yang berfokus pada pemberdayaan perempuan terutama keterlibatan dalam pengambilan keputusan.

Studi strategi pemerintah desa berbasis pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh (Akbari, Muhammad Safar; Mustanir, Ahmad; Jabbar, 2023). Dalam penelitian ini melihat bahwa pemberdayaan masyarakat memiliki tujuan untuk dapat meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia dalam upaya mencapai taraf hidup yang berkualitas dengan adanya perubahan-perubahan perilaku masyarakat. Sehingga strategi yang digunakan oleh pemerintah desa yaitu mengedepankan pengambilan keputusan dan pembentukan kebijakan seperti pembuatan izin edar, izin usaha dan izin halal serta kebijakan anggaran.

Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh (Mariane, 2020) menghasilkan bahwa pemerintah belum memberikan fokus yang sepenuhnya dalam menggerakkan dan melaksanakan peranannya dalam pelaksanaan CSR untuk melakukan pemberdayaan perempuan hal ini berdampak pada hasil pelaksanaannya yang belum maksimal dan belum menunjukkan keberhasilan yang tercermin



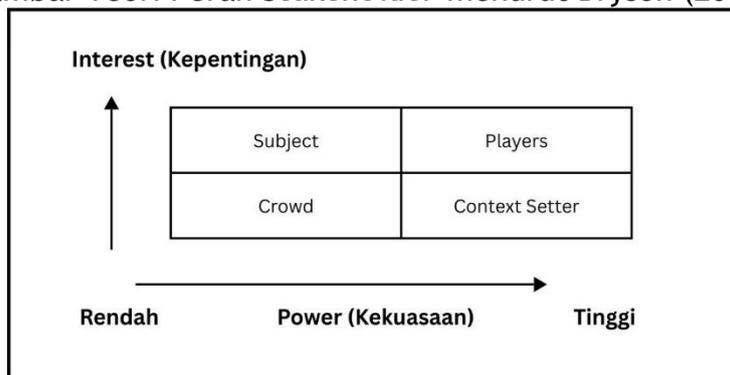
dalam empowerment index. Hasil penelitiannya juga memberikan rekomendasi agar pemerintah dapat mewujudkan adanya *networking government*.

Sedangkan pada penelitian “Strategi Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan di Desa Poleonro Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone” menyimpulkan jika dalam meningkatkan partisipasi perempuan desa dipengaruhi oleh beberapa tantangan utama dalam pengimplementasiannya seperti adanya budaya patriarki di masyarakat, keterbatasan akses pendidikan, dan tidak stabilnya perekonomian masyarakat (Sakir, Ahmad Rosandi; Amaliah, Yusriah; Lukman, 2022). Oleh sebab itu, dalam penelitian tersebut memberikan beberapa rekomendasi untuk dapat memperkuat sinergi pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi perempuan, yaitu melalui peningkatan akses terhadap pendidikan, dilakukannya kampanye kesadaran budaya, serta penguatan program pemberdayaan ekonomi. Selain itu, pemerintah desa juga diharapkan untuk bisa meningkatkan kerjasama dengan pihak eksternal dan melibatkan perempuan secara lebih aktif dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.

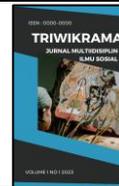
Selain itu, dalam penelitian “Pendampingan Kelompok PKK dan Pokdarwis untuk Mewujudkan Pemberdayaan Desa Ramah Perempuan”, menunjukkan jika keterlibatan *stakeholder* sangat mempengaruhi keberhasilan dalam pemberdayaan perempuan desa (Arbarini et al., 2023). Pada penelitian ini keterlibatan Kelompok PKK dan Pokdarwis dilihat dari adanya pelatihan literasi digital kepada para perempuan desa yang bertujuan untuk menggerakkan perekonomian desa di era digital. Hasil dari penelitian ini kemudian dapat dilihat dari adanya peningkatan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan perempuan untuk ikut berperan dalam mewujudkan pembangunan di desa.

Maka dari itu, perlu diadakan kebaruan kajian penelitian. Kebaharuan penelitian ini terletak pada penggunaan teori yang akan peneliti gunakan yaitu menggunakan teori *stakeholder* yang dicanangkan oleh Bryson. Dalam teori tersebut menekankan identifikasi, klasifikasi, dan pemetaan peran serta pengaruh *stakeholder* dalam program atau kebijakan melalui proses matriks yang menggunakan matriks kepentingan dan kekuasaan, sehingga peneliti dapat menganalisis dan mengelompokkan *stakeholder* sehingga dapat mengidentifikasi dan mengelompokkan *stakeholder* sehingga dapat mengelola peran dan pengaruh *stakeholder* secara efektif dalam pelaksanaan program Bini Daya di Desa Tulungrejo. Untuk mengidentifikasi *stakeholder*, (Bryson, 2004) memaparkan bahwa teknik yang digunakan adalah *Power Versus Interest Grid*. Teknik ini memiliki fokus utama pada: 1) *subjects* adalah *stakeholder* yang memiliki tingkat kepentingan yang tinggi namun memiliki pengaruh yang rendah; 2) *key players* adalah *stakeholder* yang memiliki kepentingan dan pengaruh yang tinggi; 3) *context setter* adalah *stakeholder* yang memiliki pengaruh yang tinggi namun memiliki tingkat kepentingan yang rendah; dan 4) *crowd* adalah *stakeholder* yang memiliki sedikit kepentingan dan pengaruh terhadap hasil yang diinginkan. Berikut matriks analisis peran *stakeholder* menurut (Bryson, 2004):

Gambar Teori Peran *Stakeholder* menurut Bryson (2004)



Sumber : Bryson (2004)



Untuk mengidentifikasi peran *stakeholder*, peneliti menggunakan konsep peran *stakeholder* dari (Nugroho et al., 2014) yang diklasifikasikan sebagai berikut: 1) *policy creator* adalah *stakeholder* yang memiliki peran sebagai pembuat kebijakan atau *stakeholder* yang mengambil keputusan; 2) koordinator adalah *stakeholder* yang memiliki peran untuk berkoordinasi dengan *stakeholder* lain yang terlibat; 3) fasilitator adalah *stakeholder* yang memiliki peran sebagai fasilitator yang bertugas untuk memfasilitasi dan mencukupi kebutuhan yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran; 4) implementor adalah *stakeholder* yang melaksanakan kebijakan yang mencakup kelompok sasaran; 5) akselerator adalah *stakeholder* yang memiliki peran untuk mempercepat dan memberikan kontribusi dengan tujuan agar program yang berjalan dapat sesuai dengan sasaran atau bahkan sampai mempercepat program tersebut berjalan. Berbeda dengan beberapa studi literatur yang sudah disebutkan yang memiliki fokus pada kota besar ataupun dalam skala beberapa desa, sehingga penelitian ini memiliki pembaharuan dalam eksplorasi dinamika pemberdayaan perempuan di wilayah pedesaan dengan melaksanakan program Bini Daya dengan menganalisis *stakeholders*-nya. Dalam penelitian ini juga akan berfokus pada sinergi *stakeholders*, terutama di tingkat lokal, yang berfokus pada program Bini Daya.

## 2. METODE

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan dengan desain deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena secara mendalam melalui perspektif partisipan. Desain deskriptif dipilih dikarenakan memberikan gambaran secara faktual, sistematis dan akurat mengenai pada peran para *stakeholder* dalam pemberdayaan perempuan melalui Program Bini Daya di Desa Tulungrejo, Kota Batu, khususnya dalam mengeksplorasi praktik *stakeholder*

### Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian menggunakan tiga metode utama, yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan langsung oleh peneliti melalui wawancara dengan informan. Selain itu, peneliti juga menggunakan data sekunder yang relevan seperti jurnal yang relevan serta beberapa informasi yang didapatkan dari pusat informasi Desa Tulungrejo melalui akun Instagram @tulungrejo\_pemdes dan website resmi Desa Tulungrejo.

Pemilihan informan ini dilakukan secara *purposive sampling* yang dimana sampel ini ditentukan berdasarkan pertimbangan yang dilakukan peneliti yang dianggap relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian. Para informan ini tentunya akan dipilih dari orang-orang yang bersinggungan, berpengalaman langsung, serta pihak-pihak yang terdampak terhadap adanya pelaksanaan program dan keterlibatan dengan jaringan kerja sama yang ada. Berikut daftar informan dari penelitian.

No	Nama (Inisial)	Jenis Kelamin	Peran
1	Bapak H	Laki-Laki	Perangkat Desa
2	Bapak D	Laki-Laki	Perangkat Desa
3	Ibu M	Perempuan	Ketua KWT 99

4	Ibu A	Perempuan	Anggota KWT 99
5	Ibu TA	Perempuan	Ketua KWT K2P
6	Ibu TI	Perempuan	Pengurus PKK Desa
7	Ibu Z	Perempuan	Warga Desa Tulungrejo

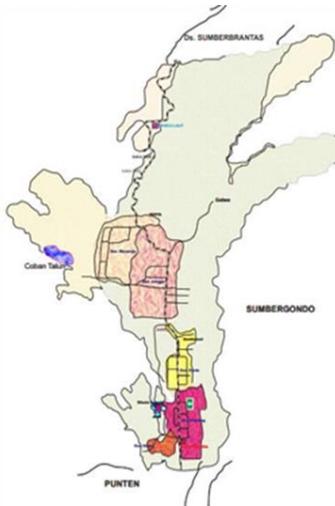
Tabel Data Informan  
Sumber: Diolah oleh peneliti

### Analisis Data

Analisis data akan dilakukan dengan menggunakan teknik analisis model interaktif menurut Miles and Huberman (dalam Zulfirman, 2022) meliputi tiga komponen yaitu: Pertama, reduksi data, penyajian data (*data display*), verifikasi data, serta penarikan kesimpulan yang diambil dari data-data yang telah dianalisis serta data-data yang sudah dipastikan berdasarkan bukti-bukti yang telah ditemukan di lokasi penelitian. Pada langkah ini peneliti akan menemukan kesimpulan dalam data-data yang sudah diperoleh.

Lokasi Penelitian:

Gambar Peta Desa Tulungrejo



Sumber: Website Desa Tulungrejo

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### HASIL

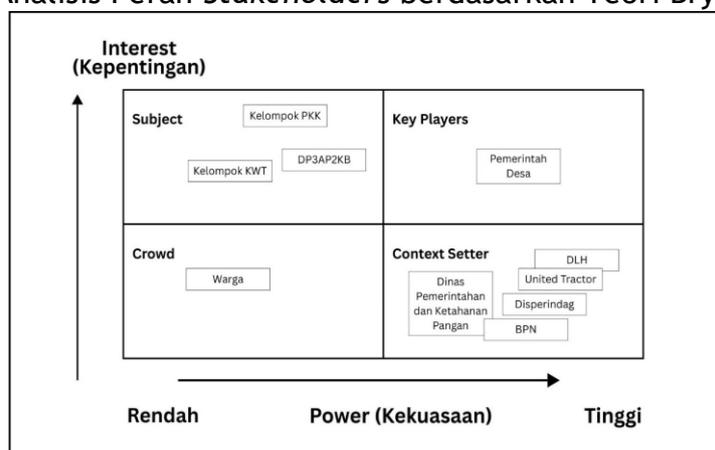
Program Bini Daya merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tulungrejo dalam upaya pemberdayaan perempuan. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, program Bini Daya menasar pada dua kelompok utama, yaitu PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) dan KWT (Kelompok Wanita Tani). Kedua kelompok tersebut menjadi pelaksana utama dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemberdayaan perempuan yang mencakup pelatihan usaha, produksi produk rumahan, dan kegiatan lainnya. Dalam pelaksanaan program ini tentunya mendapat dukungan dari berbagai *stakeholder*. *Stakeholder* yang terlibat dalam pelaksanaan program ini adalah: 1) Pemerintah Desa Tulungrejo; 2) KWT; 3) PKK; 4) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu; 5) Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu; 6) Dinas Koperasi, UMKM,

Perindustrian, dan Perdagangan Kota Batu; 7) Dinas Kesehatan Kota Batu; 8) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 9) *United Tractor*; 10) Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan; 11) Masyarakat. Untuk mengidentifikasi *stakeholder* dan perannya, maka diperlukan analisis mendalam sebagai berikut:

### 1. Identifikasi *Stakeholder* dalam Pelaksanaan Program Bini Daya

*Stakeholders* yang terlibat dalam pemberdayaan perempuan melalui program Bini Daya yang diidentifikasi menurut teori (Bryson, 2004) dapat dianalisis sebagai berikut:

Gambar Analisis Peran *Stakeholders* berdasarkan Teori Bryson (2004)



Sumber: Diolah oleh peneliti

#### a. *Subject*

Pihak yang teridentifikasi menjadi *subject* dalam program Bini Daya terdiri dari kelompok PKK dan kumpulan KWT dari desa Tulungrejo. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai identifikasi *subject* dalam pelaksanaan program Bini Daya:

##### 1. Kelompok PKK Desa Tulungrejo

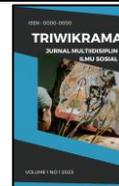
Pada umumnya, kegiatan PKK di desa tentunya melibatkan perempuan di desa dan diberikan dengan tujuan pemberdayaan perempuan. PKK Desa Tulungrejo melaksanakan banyak kegiatan yang dibagi dalam beberapa kelompok kerja seperti Pokja 1, Pokja 2, Pokja 3, dan Pokja 4. Setiap Pokja memiliki kegiatan masing-masing sesuai dengan kewajiban dan wewenang masing-masing Pokja.

*“Kegiatan PKK desa biasanya diturunkan ke dusun kegiatannya meliputi arisan, kader-kader balita lansia dan membuat ekoenzim dari sampah juga pilah sampah, diolah bikin kompos gitu. Kegiatan tiap dusun berbeda, tidak semua sama kalo ibu emang inisiatifnya ikut dari PKK desa nyari pengumuman, baru disampaikan ke PKK dusun.”* (Wawancara dengan Ibu TI pada 30 April 2025)

Dalam konteks kepentingan, tentunya PKK memiliki kepentingan yang cukup tinggi dalam pemberdayaan perempuan. Karena dengan adanya perempuan diberi pelatihan dan kegiatan yang dapat menunjang keterampilan dan kemampuan perempuan sehingga perempuan dapat berdaya. Namun sayangnya pengaruh kelompok PKK saat pelaksanaan program Bini Daya terutama dalam konteks perumusan kebijakan yang tujuannya untuk memberdayakan perempuan sangat kecil. Hal ini dibuktikan dengan sulitnya kelompok PKK untuk meminta anggaran lebih kepada Pemerintah Desa.

\*Corresponding author

E-mail addresses: annisaaa@student.ub.ac.id



*“Kalo anggaran dari desa ya memang sulit nggak agak, kalau minta anggaran dikit tidak dihiraukan misalnya, minta ATK atau buku-buku administrasi. Kan ada lomba administrasi misal nggak ada bukunya kita juga gimana ya. Itu juga ga direalisasikan sama desa.” (Wawancara dengan Ibu TI pada 30 April 2025)*

## 2. Kelompok KWT Desa Tulungrejo

Kelompok KWT juga menjadi salah satu *subject* dalam pelaksanaan program Bini Daya. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh KWT meliputi produksi produk seperti jamu kemasan dan macam-macam kerupuk seperti kerupuk wortel dan lain-lain. Selain memproduksi produk, KWT juga melakukan penjualan dan pemasaran produk sehingga mendapatkan hasil yang nantinya dibagi ke anggota KWT berupa gaji ataupun dalam bentuk bagi hasil. Dengan adanya kegiatan-kegiatan di KWT yang anggotanya semua adalah perempuan dan kebermanfaatannya untuk perempuan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh KWT memiliki kepentingan yang tinggi dalam pemberdayaan perempuan. KWT tidak memiliki pengaruh yang tinggi dalam program Bini Daya dalam konteks perumusan kebijakan.

## 3. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

DP3AP2KB memiliki kepentingan dalam pemberdayaan perempuan terutama dalam PPPA, sesuai dengan tujuan dinas tersebut. Namun dalam konteks program Bini Daya, PPPA lebih fokus pada PKK yang fokus pada program kerja pengentasan stunting. Namun dalam program Bini Daya, keterlibatan PPPA hanya sebatas memberi pelatihan dan dukungan regulasi dari tingkat kota. Namun dalam praktiknya, peran dinas ini tidak dominan dalam menentukan arah kegiatan di tingkat desa. Berikut pernyataan dari ibu T selaku pengurus PKK desa.

*“Untuk masalah stunting kerjasama dengan Dinas Kesehatan. Kalau Dinas Pemberdayaan Perempuan masuk juga. Pemberdayaan Perempuan itu Pokja 1-4.” (Wawancara dengan Bapak H pada 25 April 2025)*

### b. Key Players

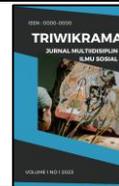
Key Players merupakan para *stakeholders* yang memiliki tingkat kekuasaan dan tingkat pengaruh yang besar pada suatu program kebijakan. Pemerintah desa memiliki kekuasaan yang besar dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat termasuk pemberdayaan perempuan di desa. Menurut pasal 26 Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang desa memaparkan jika Kepala Desa berwenang dan bertugas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan desa. Pemerintahan Desa Tulungrejo memiliki wewenang dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan di desa. Selain itu, Pemerintahan Desa Tulungrejo menasar pemberdayaan masyarakat desa membentuk program Bini Daya (Pembinaan Wanita Berdaya) yang merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi pemerintahan desa.

*“Di desa kan ada RPJMDes dari Rancangan Pembangunan Jangka Menengah ini gimana caranya pemerintah desa bekerja sama dengan PKK, dan KWT bersinergi untuk melaksanakan program Bini Daya ini.” (Wawancara dengan Bapak D pada tanggal 7 Mei 2025)*

### c. Context Setter

Merupakan pihak yang memiliki kekuasaan yang besar namun memiliki sedikit kepentingan dalam pelaksanaan suatu program. Adapun berikut merupakan identifikasi *Context Setter* pada Program Bini Daya:

#### 1. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan



Peran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam pelaksanaan program bini daya dapat dikatakan memiliki kekuasaan yang besar. Hal itu dapat dilihat dari adanya pemberian bimbingan teknis serta pemberian pendamping yaitu PPL (Petugas Penyuluh Lapangan) yang diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan produktivitas dalam sektor pertanian.

*“Biasanya ada bimbingan yang diberikan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan melalui PPL, apa yang harus dilakukan misalnya dinas minta dana ini dari kelompok yang belum setor. Kalo dapat bantuan juga kan harus masuk aplikasi-aplikasi, terus kalo ada bantuan yang harus menggunakan proposal itu biasanya PPL yang membantu.” (Wawancara dengan Ibu A pada tanggal 27 April 2025)*

Meskipun memiliki kekuasaan yang besar, dapat dikatakan jika Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan memiliki sedikit kepentingan dalam program ini mengingat orientasi kelembagaannya yang bersifat umum dan menyasar pada seluruh pelaku pertanian sehingga kurang sejalan dengan tujuan program ini yang hanya menargetkan kelompok perempuan.

## 2. DLH (Dinas Lingkungan Hidup)

Pada Program Bini Daya Dinas Lingkungan Hidup memiliki kekuasaan yang besar karena turut dilibatkan terutama untuk menjadi narasumber ataupun fasilitator dalam pelatihan dengan isu lingkungan seperti pengelolaan sampah dan pembuatan ekoenzim. Namun dalam hal ini DLH hanya memiliki sedikit kepentingan dalam program ini karena keterlibatannya hanya melalui undangan sehingga peran yang dilaksanakan DLH dalam program ini hanya bersifat sebagai pendukung dan terbatas hanya pada topik tertentu.

*“Biasanya saya mengundang dinas terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup untuk memberikan pelatihan dan materi masalah sampah ekoenzim atau masalah yang lain.” (Wawancara dengan Ibu TA pada tanggal 27 April 2025)*

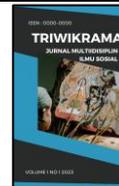
## 3. Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan

Dalam program ini Diskumperindag memiliki kekuasaan yang besar terutama dalam aspek pemasaran produk hasil olahan. Diskumperindag dalam hal ini membantu keberlanjutan program dengan membantu untuk menjadi penghubung untuk memasarkan produk yang dihasilkan ke pasar yang lebih besar sehingga mampu meningkatkan nilai jual dan jangkauan produk. Namun, kepentingan yang dimiliki Diskumperindag dapat dikatakan kecil karena hanya berfokus pada pengembangan penjualan secara umum dan berada diluar sektor kesehatan dan pertanian.

## 4. BPN

Sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan, BPN memiliki kekuasaan yang besar dalam terlaksananya program ini. Kekuasaan tersebut dapat dilihat pada awal sebelum terbentuknya KWT dimana BPN memberikan lahan pertanian melalui reformasi agraria ke-1 Kemudian peran BPN dalam program ini juga menjembatani program ini kepada dinas-dinas terkait serta banyak membantu mengenai pelaksanaan administrasi yang dilakukan. Namun, BPN dapat dikatakan memiliki kepentingan yang rendah dalam program ini mengingat BPN berada diluar dari sektor pertanian dan kesehatan.

*“Mulai pertama terbentuknya KWT didukung oleh BPN. Di BPN ada reforma agraria pada tahun pertama, kedua dan, ketiga. Nah itu waktu reforma tahun ketiga itu dilombakan satu provinsi itu BPN juara 1, nah yang dibawa KWT Kekep dari perwakilan Batu. BPN ini melihat butuhnya KWT ini apa. Mereka tidak membantu alat, memberi cuman sebagai perantara membuat perizinan. BPN membantu*



sebagai perantara. Misalnya ke BLUD, BPN ini sebagai perantaranya.” (Wawancara dengan Ibu TA tanggal 27 April 2025)

#### 5. *United Tractor*

Pada program ini, *United Tractor* berperan sebagai swasta yang memberikan kebutuhan dalam pelaksanaan program Bini Daya. Berikut kesaksian dari Ibu M selaku ketua dari KWT 99 peran *United Tractor* dalam Program ini:

“...terus kalau dari swasta ada itu *United Tractor*, perusahaan itu kan kayak ada program itu ya mba mendampingi. Memberikan apa yang menjadi kebutuhan dan yang kita minta, saya kemarin itu dapat spinner, dapat blender, dapat penggorengan.” (Wawancara dengan Ibu M pada tanggal 27 April 2025).

Melihat pada kesaksian tersebut, dapat dilihat jika *United Tractor* memiliki peran besar dalam pelaksanaan program tersebut karena berperan sebagai salah satu penyedia kebutuhan dalam pelaksanaan program. Namun, *United Tractor* dapat dikatakan memiliki sedikit kepentingan karena berada diluar sektor pertanian dan kesehatan.

#### d. *Crowd*

Merupakan *stakeholders* yang memiliki sedikit kepentingan juga pengaruh terhadap hasil akhir yang diinginkan. Adapun pihak yang merupakan *crowd* dalam program Bini Daya ini adalah Warga. Pada pelaksanaan program Bini Daya ini warga masih asing akan nama serta kegiatan yang dijalankan. Namun warga hanya memiliki pemahaman akan kelompok PKK dan mereka merupakan kelompok yang terdampak akan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Berikut merupakan kesaksian dari ibu Z yang merupakan salah satu warga desa Tulungrejo:

“Saya kurang paham ya mba, tapi kalo program-program gitu saya taunya ya cuma PKK untuk perempuan-perempuan gitu.” (Wawancara dengan Ibu Z pada tanggal 21 April 2025).

## 2. Identifikasi Peran *Stakeholder* dalam Pelaksanaan Bini Daya

### a. *Policy creator*

*Policy creator* merupakan *stakeholder* yang berperan dalam membuat kebijakan atau *stakeholder* yang mengambil keputusan. Dalam program Bini Daya ini pemerintah desa berperan sebagai *policy creator*. Sebagai pemegang kekuasaan dan otoritas tertinggi, pemerintah desa merupakan *stakeholder* yang memegang kewenangan dalam merancang kebijakan, mengambil keputusan, dan menentukan pelaksanaan program. Pembuatan kebijakan ini diawali dengan musyawarah desa, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), hingga pengalokasian anggaran Dana Desa.

### b. Koordinator

Koordinator utama dalam program Bini Daya ini adalah pemerintah desa, yang berada di bawah naungan Sie Pelayanan. Pemerintah desa memiliki wewenang untuk mengkoordinir PKK dan KWT untuk diberi pelatihan yang dibutuhkan oleh KWT ataupun PKK untuk menambah kualitas sumber daya yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan. Dalam pelaksanaannya terdapat aktor lain yaitu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu yang diwakili oleh PPL (Petugas Pengawas Lapangan) yang bertugas untuk mengkoordinasikan tugas yang harus dilakukan oleh KWT seperti tugas administratif dan penyuluhan mengenai dalam konteks pertanian.

### c. Fasilitator

Fasilitator merupakan *stakeholder* yang berperan dalam memfasilitasi dan memberikan apa yang diperlukan oleh kelompok sasaran. Pertama, BPN berperan dalam memfasilitasi pembuatan sertifikat tanah pada saat Reformasi Agraria 2021 sehingga tanah dapat dimanfaatkan oleh KWT. Kedua, DLHK memberikan penyuluhan dan pelatihan di kegiatan PKK yang relevan dengan isu-isu lingkungan, seperti masalah sampah dengan memberikan penyuluhan pengolahan sampah rumah



tangga dan pembuatan ekoenzim. Ketiga, Diskumperindag berperan dalam memfasilitasi pemasaran produk-produk yang telah dibuat oleh kelompok KWT serta memberi penyuluhan akan cara pengemasan dan cara pemasaran yang baik. Keempat, Dinas Kesehatan serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana bekerja sama dalam memfasilitasi pemberian penyuluhan mengenai kesehatan, mengadakan posyandu rutin bagi ibu-ibu, serta pengendalian angka *stunting* melalui kolaborasi dengan kelompok PKK. Terakhir, United Tractor sebagai pihak swasta yang mendampingi serta mencukupi kebutuhan yang diperlukan oleh kelompok KWT seperti *spinner*, blender hingga penggorengan.

#### **d. Implementor**

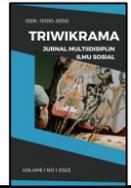
Implementor adalah *stakeholder* yang melaksanakan program. Dalam hal ini pelaksana program Bini Daya adalah Pemerintah Desa Tulungrejo, KWT, dan PKK. Pemerintah Desa bertanggung jawab untuk mengawasi dan memberikan bantuan untuk pemberdayaan perempuan di program Bini Daya. Sedangkan KWT dan PKK adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang memberdayakan perempuan yang dinaungi oleh Pemerintah Desa Tulungrejo melalui program Bini Daya.

#### **e. Akselelator**

Akselelator merupakan *stakeholder* yang mempunyai peran sebagai pemercepat dan pemberi kontribusi agar program terlaksana sesuai dengan sasaran bahkan lebih cepat waktu pencapaiannya. Pemerintah Desa Tulungrejo sebagai akselerator utama yakni dengan mempercepat proses perencanaan, pelaksanaan hingga melakukan dukungan pelatihan pengolahan, pengemasan dan pemasaran produk bagi KWT dan memberikan pelatihan terkait ekoenzim dan probiotik bagi PKK. Pemerintahan desa juga sebagai akselerator juga memberikan alokasi dana dan berbagai bantuan alat untuk menunjang pemberdayaan perempuan. Selanjutnya, peran PKK yaitu mempercepat pencapaian program Bini Daya dengan mengadakan berbagai kegiatan yang mendukung pemberdayaan perempuan. KWT juga mendorong peningkatan kapasitas perempuan dikarenakan KWT sebagai wadah bagi wanita untuk diberdayakan dalam pembangunan desa yang dapat mempercepat dan mendukung pelaksanaan Program Bini Daya.

## **PEMBAHASAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan dan kerja sama antar *stakeholder* dalam Program Bini Daya di Desa Tulungrejo memainkan peran penting dalam memberdayakan perempuan. *Stakeholder* yang terlibat dalam program ini turut berkontribusi dalam pelatihan, pembentukan kelompok perempuan, serta memfasilitasi perempuan dalam kegiatan-kegiatan yang dapat memberdayakan perempuan. Temuan dalam penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan di India yang dilakukan oleh Deininger, Nagarajan, dan Singh (2020) dimana penelitian ini mengemukakan bahwa ketika perempuan menjadi pemimpin ataupun diberikan kesempatan lebih untuk mengambil bagian dalam suatu program, maka hal tersebut dapat membantu perempuan lain untuk mendapatkan akses yang lebih mudah ke program kerja NREGS yang memberikan peluang kerja bagi masyarakat miskin. Dalam penelitian tersebut, keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan desa melalui skema reservasi (alokasi posisi politik untuk perempuan) dapat meningkatkan partisipasi perempuan dalam pemerintahan. Tak hanya, keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan dan pemberdayaan dapat mengurangi praktik korupsi dan pelecehan seksual serta lebih aktif dalam mengawasi berjalannya program. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan dapat berdampak pada pemberdayaan perempuan secara ekonomi dan sosial.



Jika dibandingkan, terdapat persamaan dan perbedaan antara dua konteks tersebut. Meskipun sama-sama menekankan pentingnya pemberdayaan perempuan, namun dalam program Bini Daya, perempuan hanya dijadikan objek dalam pemberdayaan sehingga keterlibatan perempuan dalam tata kelola pemerintahan terutama dalam Program Bini Daya terkesan hanya formalitas. Sehingga diperlukan penyatuan tujuan yang sesuai dengan tujuan awal dibentuknya Program Bini Daya yaitu meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan desa. Sehingga perempuan tidak hanya menjadi objek, namun menjadi subjek dalam pembangunan desa. Sementara di India, perempuan langsung terlibat dalam pemberdayaan melalui jalur struktural-politik, sehingga dalam pelaksanaan pemberdayaan perempuan, perempuan tidak hanya menjadi objek, namun menjadi subjek dalam tata kelola pemerintahan.

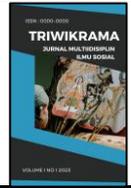
Selain itu, dampak jangka panjang di India menunjukkan perubahan yang signifikan dalam pola partisipasi perempuan, termasuk dalam kepercayaan diri perempuan dalam menyampaikan pendapat, lebih mudah mengakses sumber daya ekonomi, serta meningkatnya jumlah perempuan dalam mencalonkan diri sebagai pemimpin tetap. Hal ini belum terlihat dalam Program Bini Daya, karena program ini masih berfokus pada pemberdayaan berbasis keterampilan dan kelompok usaha kecil.

#### 4. SIMPULAN

Program Bini Daya merupakan wujud konkret upaya pemberdayaan perempuan yang dilaksanakan Pemerintah Desa Tulungrejo secara partisipatif dan kolaboratif. Keberhasilan program ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai *stakeholder* yang memiliki peran beragam, mulai dari *policy creator*, koordinator, fasilitator, implementor, hingga akselerator. Dengan menggunakan analisis teori *stakeholder* Bryson dan klasifikasi peran menurut Nugroho, terlihat bahwa sinergi antar aktor lokal seperti pemerintah desa, PKK, KWT, dinas-dinas terkait, sektor swasta, dan masyarakat merupakan kunci utama dalam menciptakan pemberdayaan perempuan yang berkelanjutan. Program ini telah membuka ruang bagi perempuan untuk berkembang secara ekonomi dan sosial melalui pelatihan, produksi, pemasaran produk, serta kegiatan komunitas. Perempuan dilibatkan dalam berbagai aktivitas yang memperkuat peran mereka dalam pembangunan desa. Oleh karena itu, ke depan perlu adanya penguatan dalam aspek pengambilan keputusan dan kepemimpinan perempuan di tingkat lokal. Perempuan harus dilibatkan secara lebih substantif sebagai subjek dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan desa, agar Bini Daya tidak hanya menjadi program berbasis partisipasi, tetapi juga menjadi gerakan yang memperkuat posisi strategis perempuan dalam tata kelola desa.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Akbari, Muhammad Safar; Mustanir, Ahmad; Jabbar, A. (2023). Strategi Pemerintah Desa Berbasis Pemberdayaan Perempuan Dalam Peningkatan Pendapatan Masyarakat Di Ukm. *Jurnal Dinamika Pemerintahan*, 06(2), 180-196. [https://scholar.google.co.id/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=id&user=srl7FjoAAAAJ&sortBy=pubdate&citation\\_for\\_view=srl7FjoAAAAJ:foquWX3nUaYC](https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=srl7FjoAAAAJ&sortBy=pubdate&citation_for_view=srl7FjoAAAAJ:foquWX3nUaYC)
- Arbarini, M., Desmawati, L., Loretha, A. F., & Hardiyanti, N. (2023). Pendampingan Kelompok PKK dan Pokdarwis untuk Mewujudkan Pemberdayaan Desa Ramah Perempuan. *DIKMAS: Jurnal Pendidikan Masyarakat Dan Pengabdian*, 03(3), 659-668.
- Bryan, E., & Mekonnen, D. (2023). Does small-scale irrigation provide a pathway to women's empowerment? Lessons from Northern Ghana. *Journal of Rural Studies*, 97, 474-484. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2022.12.035>



- Bryson, J. M. (2004). What to do when *Stakeholders* matter. *Public Management Review*, 6(1), 21-53. <https://doi.org/10.1080/14719030410001675722>
- Deininger, K., Nagarajan, H. K., & Singh, S. K. (2020). Women's political leadership and economic empowerment: Evidence from public works in India. *Journal of Comparative Economics*, 48(2), 277-291. <https://doi.org/10.1016/j.jce.2019.12.003>
- Hubeis, A. V. S. (2018). *Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa*. PT Penerbit IPB Press.
- Mariane, I. (2020). PERAN PEMERINTAHAN DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (SCR). *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol 11, No.
- Marmoah, S. (2019). *Manajemen Pemberdayaan Perempuan Rimba*. Deepublish.
- Nugroho, H. C., Zauhar, S., & Suryadi. (2014). Koordinasi Pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Pembangunan Dan Alam Lestari*, 5(1), 12-22. <https://jpal.ub.ac.id/index.php/jpal/article/view/147>
- Sakir, Ahmad Rosandi; Amaliah, Yusriah; Lukman, J. P. (2022). Strategi Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan di Desa Poleonro Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, 1, 18-33.
- Tokan, F. B., & Gai, A. (2020). PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN (Studi tentang Relasi Kuasa dan Akses Perempuan dalam Pembangunan Desa di Desa Watoone - Kabupaten Flores Timur). *Jurnal Caraka Prabu*, 4(2), 213-234. <https://doi.org/10.36859/jcp.v4i2.298>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur mengenai tugas dan wewenang Kepala Desa
- Widiastuti, T., Al-shami, S. A., Mawardi, I., Zulaikha, S., Haron, R., Kasri, R. A., Mustofa, M. U. Al, & Dewi, E. P. (2024). Capturing the barriers and strategic solutions for women empowerment: Delphi analytical network process. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 10(3), 100345. <https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2024.100345>